



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURIS BAILAN NOVERMINDA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 950817

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 786.000.000

1. Tanah Seluas 72.000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 786.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINI BUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FINO SOLO METIC/1YD Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA V110ZHE SPM SOLO Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000
4. MOTOR, HONDA NF11A1C M/T / SEPEDAMOTOR R2 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.300.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.265.481

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 932.065.481

III. HUTANG Rp. 275.670.432

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 656.395.049

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAMHARIL
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 678132

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 235.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/90 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 126.500.000

1. MOTOR, HONDA C1C02N16M2 A/T / SPM R2 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA V1J02Q32L1 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, SUZUKI AVI414F SDX (4X2) M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 33.389.188

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 395.389.188

III. HUTANG Rp. 58.869.200

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 336.519.988

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUR ANISAH YACOB
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
3. NHK : 763413

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.500.000
1. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
Rp. 7.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	43.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.690.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	61.390.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	61.390.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IBNU JARIL
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 947692

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 16 m2/29 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 15.003 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 153.000.000

1. MOTOR, RX KING - Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, SCOOPY - Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 864.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 864.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HIMUN ZUHRI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 961104

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 480.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 506 m2/165 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 101.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 80.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.119.891

F. HARTA LAINNYA Rp. 55.000.000

Sub Total Rp. 736.119.891

III. HUTANG Rp. 97.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 639.119.891

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.